

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik, khususnya dana desa, merupakan salah satu prinsip fundamental dalam tata kelola pemerintahan yang baik. Menurut Mardiasmo (2016), akuntabilitas didefinisikan sebagai kewajiban seseorang atau entitas untuk melaporkan penggunaan sumber daya kepada pihak-pihak yang berkepentingan, yang pada konteks ini adalah masyarakat. Dalam pengelolaan dana desa, akuntabilitas memastikan bahwa setiap rupiah yang digunakan telah diakuntabilkan dengan benar dan sesuai dengan peruntukannya. Ketidakjelasan dalam proses pengelolaan dana desa dapat menimbulkan potensi risiko penyalahgunaan dana, yang pada akhirnya merugikan masyarakat. Dalam konteks Indonesia, dana desa memiliki peranan penting dalam mengakselerasi pembangunan di daerah-daerah tertinggal. Sutopo & Sulistyarningsih (2017) menunjukkan bahwa banyak desa di Indonesia yang masih mengalami kesulitan dalam menata keuangan desa mereka, khususnya dalam hal pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan dana. Untuk itu, peran akuntabilitas tidak hanya memastikan penggunaan dana sesuai peruntukkan, tapi juga memastikan keadilan dan pemerataan dalam distribusi manfaat bagi seluruh masyarakat desa.

Dana desa, yang disalurkan oleh pemerintah pusat maupun daerah, dimaksudkan untuk memacu pembangunan di tingkat desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Susilo & Hartono, 2017). Namun, tantangannya adalah bagaimana memastikan dana tersebut digunakan secara efektif dan efisien. Dalam beberapa kasus, kurangnya transparansi dan akuntabilitas telah menyebabkan penyimpangan dan ketidaksesuaian penggunaan dana (Putra & Wijaya, 2018). Dalam melaksanakan pengelolaan dana desa, kehadiran sistem pelaporan yang baik menjadi kunci.

Widodo & Prasetyo (2019) menekankan pentingnya sistem pelaporan yang terintegrasi dan mudah diakses oleh masyarakat untuk memonitor penggunaan dana tersebut. Selain memastikan transparansi, sistem ini juga memfasilitasi feedback dari masyarakat terkait implementasi berbagai proyek pembangunan yang dibiayai oleh dana desa. Melalui partisipasi aktif masyarakat, pemerintah desa dapat meningkatkan efektivitas penggunaan dana dengan memprioritaskan kegiatan yang benar-benar dibutuhkan oleh komunitas setempat.

Selain itu, Setiawan & Nugroho (2020) menyoroti pentingnya pelatihan dan pendidikan bagi aparatur desa dalam mengelola dana desa. Pengetahuan yang memadai mengenai perencanaan, penganggaran, dan pelaporan keuangan sangat esensial untuk memastikan dana desa dikelola dengan benar. Investasi dalam kapasitas SDM di tingkat desa akan memastikan bahwa dana tersebut tidak hanya digunakan dengan benar tetapi juga memberikan dampak maksimal bagi perkembangan dan kesejahteraan masyarakat desa.

Dana desa telah menjadi salah satu instrumen kunci dalam mendorong pembangunan di tingkat lokal. Namun, di berbagai desa di Indonesia, akuntabilitas dalam pengelolaan dana ini sering menjadi isu yang kontroversial. Hariyanto & Sari (2019) mengungkapkan bahwa di beberapa desa, kurangnya transparansi dalam proses penganggaran dan pelaporan telah menciptakan ruang bagi praktik-praktik koruptif dan penyalahgunaan dana. Ketidakjelasan dalam regulasi, kurangnya pemahaman aparatur desa tentang prosedur keuangan, dan minimnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan menjadi beberapa faktor penyebab utama dari masalah ini.

Menyikapi fenomena tersebut, Priyono & Malik (2020) menyoroti peran penting masyarakat dalam memastikan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Mereka berpendapat bahwa peningkatan kapasitas masyarakat, melalui edukasi dan pelatihan terkait tata kelola dana desa, dapat membantu masyarakat dalam memahami hak dan kewajiban mereka serta berpartisipasi aktif

dalam proses pengawasan. Ketika masyarakat dilibatkan secara aktif dan memiliki pemahaman yang baik tentang bagaimana dana tersebut seharusnya dikelola, potensi penyimpangan dapat diminimalkan.

Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan dana desa dapat meningkatkan akuntabilitas. Sebagai contoh, penggunaan sistem informasi keuangan desa yang terintegrasi memungkinkan pihak-pihak yang berkepentingan untuk memantau pengeluaran dan memastikan kesesuaiannya dengan rencana (Hasan & Iswanto, 2019). Hal ini juga mendukung partisipasi masyarakat, yang dapat mengakses informasi terkait penggunaan dana desa secara real-time dan memberikan umpan balik kepada pemerintah desa.Pengembangan teknologi informasi, khususnya dalam sektor keuangan publik, telah mengubah cara pemerintah berinteraksi dengan masyarakat. Salah satu contoh yang paling menonjol adalah melalui pengenalan platform berbasis web yang memungkinkan warga untuk memantau anggaran dan pengeluaran secara online, meningkatkan transparansi dan memungkinkan pemerintah untuk mendapatkan masukan langsung dari warga yang mereka layani (Rahman & Putri, 2020). Dengan adanya akses ke informasi ini, masyarakat memiliki kesempatan untuk memeriksa dan mengkritisi penggunaan dana desa, memastikan bahwa dana tersebut digunakan untuk proyek-proyek yang sesuai dengan prioritas dan kebutuhan komunitas.

Selain itu, teknologi informasi juga membantu pemerintah desa dalam meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan dana desa. Sistem informasi keuangan yang terintegrasi dapat mengurangi kesalahan dalam pencatatan dan pelaporan, mengotomatisasi banyak proses administratif, dan menghilangkan redundansi. Dengan demikian, hal ini memungkinkan pemerintah desa untuk fokus pada tugas-tugas strategis seperti perencanaan dan implementasi proyek (Widodo & Sutopo, 2018). Penggunaan teknologi informasi juga memberikan manfaat

dalam memperkuat kinerja audit internal dan eksternal. Auditor dapat dengan mudah memverifikasi dan memvalidasi transaksi keuangan dengan mengakses basis data yang ada, memastikan bahwa praktik akuntansi yang tepat telah diikuti dan bahwa tidak ada penyimpangan yang terjadi. Oleh karena itu, penerapan teknologi informasi dalam pengelolaan dana desa tidak hanya mempromosikan transparansi dan akuntabilitas, tetapi juga menjamin integritas proses pengelolaan dana tersebut (Darmawan & Yusuf, 2019).

Dalam era digital saat ini, banyak desa telah mengenali potensi teknologi informasi dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan dana desa. Namun, terdapat tantangan signifikan yang dihadapi oleh beberapa desa, khususnya di daerah-daerah terpencil. Infrastruktur teknologi yang belum memadai, seperti ketiadaan jaringan internet yang stabil dan kurangnya perangkat komputer, menjadi hambatan utama dalam implementasi sistem informasi keuangan yang terintegrasi (Suryana & Adiwijaya, 2020). Selain itu, kurangnya keterampilan dan pelatihan yang berkaitan dengan teknologi informasi di kalangan aparatur desa juga menjadi isu penting. Hal ini berdampak pada kesulitan dalam mengadopsi dan memanfaatkan sistem teknologi informasi dengan optimal. Tidak hanya masalah infrastruktur dan SDM, resistensi budaya terhadap teknologi juga kerap menjadi isu. Banyak desa yang masih memegang teguh tradisi dan budaya manual dalam mengelola administrasi dan keuangan, menganggap teknologi sebagai aspek yang membingungkan dan tidak esensial. Pendekatan tradisional ini, meskipun telah teruji dengan waktu, bisa menunda desa dalam mencapai potensi maksimal dari manfaat teknologi informasi, terutama dalam hal transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa (Hartati & Prasetyo, 2021).

Namun, untuk mencapai akuntabilitas yang optimal, diperlukan lebih dari sekadar teknologi. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia di pemerintah desa, pemahaman mendalam tentang regulasi terkait, serta budaya transparansi dan integritas yang kuat adalah faktor-faktor krusial lainnya dalam mengoptimalkan akuntabilitas pengelolaan dana desa (Raharjo & Supriyadi,

2020). Sumber daya manusia yang berkualitas menjadi salah satu kunci utama keberhasilan pemanfaatan teknologi informasi. Hal ini bukan hanya berkaitan dengan kemampuan teknis, tapi juga pemahaman mendalam mengenai kebijakan, regulasi, serta etika dalam pengelolaan dana desa. Pelatihan dan pendidikan berkelanjutan bagi aparatur desa sangat penting untuk memastikan bahwa mereka